

11/2001 AGG 2001/2002

LK

Per 15/02

Ror

p

SKRIPSI

SEPTY ROSIANA

**PERANAN WALI HAKIM DALAM MEMBANTU
PELAKSANAAN PERKAWINAN
(STUDI KASUS PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN
AGAMA
KECAMATAN GUBENG SURABAYA)**



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

**PERANAN WALI HAKIM DALAM MEMBANTU
PELAKSANAAN PERKAWINAN
(STUDI KASUS PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN
AGAMA
KECAMATAN GUBENG SURABAYA)**

SKRIPSI

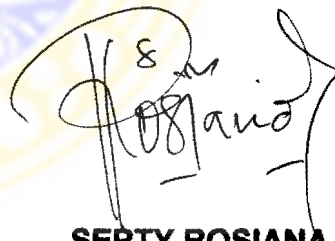
**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN DAN MELENGKAPI
TUGAS GUNA MENYELESAIKAN PROGRAM STRATA -1
DALAM BIDANG ILMU HUKUM**

Dosen Pembimbing,



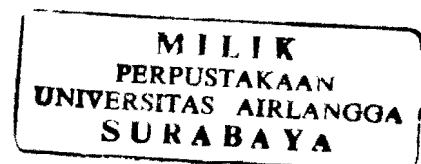
LILIEK KAMILAH, S.H., M.Hum.
NIP.130531799

Penyusun,



SEPTY ROSIANA
NIM.039914846

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**



BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. **Wali nasab** menolak/adhal menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya karena kedudukan calon suaminya tidak sebanding dalam tingkat sosial, **wali nasab** telah menjodohkan anak perempuannya dengan laki-laki lain yang lebih sesuai derajatnya. Sebenarnya ukuran kufu' (sebanding) dalam perkawinan ialah calon suami beragama Islam, mempunyai sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan dengan ukuran keturunan, pekerjaan atau kekayaan. Jadi seorang laki-laki yang **shaleh** walaupun keturunannya rendah berhak untuk kawin dengan wanita yang berderajat tinggi.
2. Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai **wali hakim**, berwenang menjadi wali nikah bagi mempelai perempuan karena **adhalnya wali nasab**, setelah adanya penetapan Pengadilan Agama yang memerintahkan perkawinan dilangsungkan. Sebelum **akad nikah** dilangsungkan, ternyata **wali nasab** hadir dan bersedia menikahkan maka penetapan Pengadilan Agama tentang **wali adhal** menjadi

gugur demi hukum. Sedangkan jika **wali nasab** tetap **adhal**, maka **akad nikah** dilangsungkan dengan **wali hakim**.

2. SARAN

1. Orang tua hendaknya memberikan dukungan moril terhadap niat baik dan kesungguhan dari anak perempuannya dan calon suaminya untuk menikah secara sah dan resmi, karena dengan persetujuan dari orang tua akan membawa pengaruh dalam membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, tentram lahir dan bathin dikemudian hari.
2. Pengadilan Agama hendaknya memproses permohonan **wali adhal** apabila pemohon dan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat perkawinan baik menurut Hukum Islam maupun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, agar hubungan pemohon dengan calon suaminya mendapatkan kepastian hukum.